PERAN ZAKAT DALAM ISLAM

Ardianis

Universitas Nadlatul Ulama Sumatera Barat

Email : anis11ardianis@gmail.com

Abstract : *One of the managers of zakat in the area of Government is BAZ (Badan Amil Zakat). The role of this institution provides the latest system in zakat management. this institution, must be immediately channeled to the mustahik according to the priority scale that has been compiled in the work program. The purpose of zakat management is the increasing awareness of the community in the fulfillment and in the service of zakat worship, the increasing function and role of religious institutions in the effort to realize the welfare of society and social justice, as well as increasing the utilization and utilization of zakat.*

Keywords: *The role of Zakat, Zakat in Islam, Amil Zakat*

Abstrak: *Salah satu pengelola zakat dalam wilayah Pemerintahan adalah BAZ (Badan Amil Zakat). Peran lembaga ini memberikan sistem terbaru dalam pengelolaan zakat. lembaga ini, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.*

Kata Kunci : *Peran Zakat, Zakat dalam Islam, Amil Zakat*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer diantaranya sandang, pangan dan papan.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam. Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimumkan peran zakat.

Peran merupakan proses untuk menghasilkan sesuatu yang akan dilakukan. Salah satu lembaga yang membuat masyarakat mengenai harta adalah BAZ. Kebanyakan masyarakat belum mengetahui peran Zakat yang dikelola oleh BAZ tersebut.

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Peran

Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal,

¹Soejono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 213

antara lain:² Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, dan di dalam peranan-peranan lain.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peranan dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial.

2. Zakat dalam Islam

a. Definisi zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zakaa*, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.³

Zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁴

2. Dasar Hukum Zakat

Q.S At-Taubah ayat 103⁵ :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 35

⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 36

⁵Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), h. 203

²Soejono Soekanto, *sosiologi...* h. 213

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 43⁶
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku”

3. Syarat sah dan rukun zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumhur ulama, syarat wajib zakat terdiri atas:⁷ islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang dizakati telah mencapai nisab, harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh, kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang, harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir atau menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.⁸

4. Macam-macam Zakat

Zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib

dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi).⁹

5. Tujuan dan hakikat zakat:

Secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.¹⁰ Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), h. 7

⁷Laila, “*Pengertian Zakat, Syarat Sah dan Rukun Zakat*”, www.pengertianzakat.com (diakses tanggal 5 Juni 2016)

⁸Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *1001 Masalah...*, h. 12

⁹Abdul al-Hamid, Mahmud al-Ba'Iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1991) h. 3

¹⁰Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 2008), h. 42

Hakikat zakat, berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak bagi golongan miskin, baik diminta ataupun tidak.¹¹ Zakat mal adalah semua harta milik kita yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat agama Islam seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan. Zakat mal itu bermacam-macam. Mal artinya harta benda. Baik berupa hasil pertanian, perternakan, perdagangan, dan lain-lain.¹²

6. Zakat Mal dan Macam-macamnya

Zakat mal terdiri dari beberapa jenis, antara lain:¹³ Zakat harta kekayaan. Zakat harta kekayaan yaitu zakat dari semua jenis harta yang sengaja disimpan baik berupa modal maupun tabungan. Harta yang dapat dikategorikan sebagai zakat ini antara lain, emas, perak, batu berharga, uang tunai, tabungan, deposito, cek, dan saham. Besarnya zakat adalah 2,5% dari nisbahnya, yaitu senilai 94 gram emas.¹⁴

Zakat Perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat dari semua jenis usaha seperti perdagangan (ekspor, impor, toko, warung, kios, pabrik, industri, dan tempat usaha lainnya), jasa, pendapatan, dan keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh dari jalan yang halal. Besar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun dari nisab 94 gram emas.¹⁵

Zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kepemilikan binatang ternak, mengenai jumlah zakat dan nisabnya dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁶

No	Jenis ternak	Nisab	Zakatnya	
			Bilangan dan jenis zakat	Umur
1	Sapi dan kerbau	30-39	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
		40-59	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
		60-69	2 ekor anak sapi atau kerbau	1 tahun lebih
		70-...	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau dan 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
2	Kambing atau domba	40-120	1 ekor kambing atau	2 tahun lebih
		120-200	1 ekor domba betina	1 tahun lebih
		201-399	2 ekor kambing atau	2 tahun lebih
		400-...	2 ekor domba betina	1 tahun lebih
			3 ekor kambing atau	2 tahun lebih
			3 ekor domba betina	1 tahun lebih
			4 ekor kambing atau	2 tahun lebih
			4 ekor domba betina	1 tahun lebih

Table 2.1 zakat binatang ternak

a. Zakat hasil tanaman

Zakat hasil tanaman yaitu zakat dari semua hasil pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Besar zakatnya adalah 5% jika dalam pengelolaan memerlukan biaya pengairan dan

¹¹Asnaini, *Zakat Produktif...*, h. 44

¹²<http://alimposlo.blogspot.co.id/2014/05/penger-tian-cara-pelaksanaan-zakat-mall.html> (diakses tanggal 11 April 2015)

¹³Abd. Shomad, *Hukum Islam....*, h. 405

¹⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam....*, h. 405

¹⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam....*, h. 406

¹⁶Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 199

10% bila dalam pengelolaannya tidak memerlukan biaya pengairan, sedangkan besar nisabnya adalah senilai dengan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras dan dikeluarkan setiap kali panen.¹⁷

b. Zakat barang hasil temuan

Zakat barang temuan yaitu zakat yang berasal dari harta yang ditemukan atau harta yang diperoleh dari cara yang tidak sengaja seperti penemuan, peninggalan, harta karun, dan sejenisnya. Besar nisabnya adalah 20% dari nilai harta tersebut dan dikeluarkan zakatnya pada saat barang itu diperoleh.¹⁸

3. Mustahiq Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60, yang uraiannya sebagai berikut:

Pertama: Fakir dan Miskin. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

pokoknya.¹⁹ Sedangkan miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.²⁰

Kedua: Kelompok Amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi, ada empat peran *amilin* (petugas zakat) yaitu mengingatkan *muzakki* untuk membayar zakat, menjaga perasaan para *mustahiq*. Karena melalui perantara amil, para *mustahiq* tidak perlu langsung bertemu dengan para *muzakki*. Lebih dari itu, cara kerja amil yang proaktif mendatangi para *muzakki* dan *mustahiq*, mereka yang kekurangan hidupnya namun tidak membiarkan diri mereka meminta-minta di jalanan, akan mendapat perhatian secara proporsional, mengontrol agar para *mustahiq* menerima pemberian zakat dari mana-mana. Karena prioritas pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* harus dilaksanakan secara adil dan

¹⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, h. 407

¹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, h. 407

¹⁹Departemen Agama RI, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, (Jakarta: 2009), h. 86

²⁰Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: 2009), h. 87

proporsional, menentukan prioritas dan pendistribusian zakat yang produktif dan konsumtif. Hal ini diharapkan dalam satuan waktu tertentu, *mustahiq* dapat berubah menjadi *muzakki*, dengan mengembangkan zakat yang diterimanya sebagai modal usaha.²¹

Ketiga: Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Dengan diberikan zakat kepada kelompok ini, diharapkan akan bertambah keimanan dan keislamannya.

Mu'allafah qulubuhum, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, menurut para ulama, diperuntukkan untuk dua jenis orang, yaitu:²²Orang kafir. Orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka untuk mendorong agar masuk Islam sebagaimana Rasulullah Saw kepada Sofwan bin Umayyah pada saat dia masih kafir dan orang yang dikhawatirkan kejelekan atau kejahatannya dengan pemberian zakat tersebut menghentikan kejahatannya. Kemudian orang Islam. Golongan yang baru masuk Islam. Zakat yang diberikan kepada mereka dalam rangka memperkuat dan menambah keyakinan mereka terhadap Islam, orang Islam

yang lemah imannya yang dikhawatirkan menjadi murtad, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang masih mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberikan zakat kepada mereka, dapat menarik simpati dari sahabat-sahabatnya yang masih kafir untuk memeluk Islam.

Keempat: dalam memerdekakan budak belian (*riqab*). Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Pemberian zakat kepada budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara Islam untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dimuka bumi.

Kelima: Kelompok Gharimin, atau kelompok orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan sama sekali tidak melunasinya.

Keenam: dalam Jalan Allah SWT (fi sabilillah). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan

²¹Abdul Hamid, *Fiqh Zakat*, (Curup: LP2 STAIN, 2012), h. 76

²² Abdul Hamid, *Fiqh Zakat*,... , h. 82

para da'i, menerbitkan buku, dan lain-lain.

Ketujuh: Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Perjalanan disini adalah perjalanan yang bernilai ibadah. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang menuntut ilmu di negara lain, atau orang yang berdakwah di suatu daerah, kemudian apabila terputus bekalnya, dan mereka membutuhkan harta atau dana untuk sekedar mencukupi kebutuhan mereka, maka kepada mereka boleh diberikan zakat.

Disamping itu porsi zakat yang diberikan kepada golongan ini sebagai berikut:²³ biaya atau dana yang diberikan untuk pengiriiman mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya, penyediaan asrama murah, mengirimkan utusan ke suatu seminar atau konferensi yang membahas tentang peningkatan kehidupan beragama di tengah masyarakat.

4. Amil Zakat

a. Amil Zakat dalam Sejarah Umat Islam

Amil zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad SAW untuk

melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari *muzakki* kepada *mustahiq*.²⁴

Nabi Muhammad SAW menerima tugas keamilan berdasarkan perintah Allah swt dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*²⁵

Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepala negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini maka Rasul mengutus para sahabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Dalam sejarah Islam, Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Mal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan

²³Abdul Hamid, *Fiqh Zakat*,..., h. 89

²⁴Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, (Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 235

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), h. 203

meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhuafa*, *fuqara*, *masakin* dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.²⁶

Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan untuk non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), dan *fai*. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, dan pembuatan struktur.²⁷

Kode etik yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada amil zakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, amil harus menahan diri dari mengambil dari yang terbaik atau yang terpilih dari muzakki. Kedua, amil tidak boleh berbuat tidak adil atau memaksa. Ketiga, amil tidak boleh korupsi atau meminta tambahan sedikitpun. Keempat, amillah yang harus mendatangi muzakki bukan muzakki

yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah.²⁸

Masa Nabi Muhammad SAW, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat Negara, tempat tinggal Nabi Muhammad sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul mal, yaitu mengumpulkan harta Negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai syariat.²⁹

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan Negara tidak terlalu banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta Negara itu untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan baitul mal tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun sektor lainnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Pendapatan Negara dari

²⁶Asnaini, *Zakat Produktif...*, h. 64

²⁷Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 2

²⁸Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi...*, h. 262

²⁹Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.37

sumber-sumber yang ada seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para muzakki segera dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari pendapatan Negara pada waktu itu berada pada tahap mudah, sederhana, dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul mal tidak Nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan Khalifah Abu Bakar.³⁰

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah pemerintahan Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan memperoleh pendapatan seperti hasil perang yang melebihi kebutuhan belanja Negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar itulah ada perubahan pada system administrasi baitul mal. Akibat penaklukan muslim, perluasan wilayah Negara dan bertambahnya pendapatan muslim seperti dari pajak tanah taklukan. Umar bin Khattab mendirikan baitul mal lokal di berbagai provinsi. Sejak saat itu, system administrasi dikembangkan dan Negara Islam memiliki baitul mal di pusat dan beberapa di lokal. Institusi baitul mal

memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan Negara yang semakin bertambah.³¹

Pengertian baitul mal saat ini, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infak, sedakah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.³²

b. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.³³

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, tapi belum dikembangkan secara

³⁰Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi...*, h. 274

³¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 192

³²Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat...*, h. 3

³³Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat...*, h. 3

professional. Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut adalah adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar langsung kepada mustahiq dari pada melalui lembaga zakat, adanya pola pandangan pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri, tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga karena tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga zakat, terdapat semacam kejemuan di kalangan muzakki, dimana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana, adanya kekhawatiran politis sebagai akibat kasus penggunaan dana umat

tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.³⁴

Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu: Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat memiliki sebagai berikut: Pertama, Nasional yang dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Agama Daerah. Ketiga, Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Keempat, Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan yaitu membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur

³⁴Asnaini, *Zakat Produktif...*, h. 64-65

ulama, cendekia, tenaga professional, praktisis pengelola zakat, Lemaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah. Lalu, menyusun kriteria calon pengurus. Kemudian, mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat. Selanjutnya, melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus sesuai dengan keahliannya. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.³⁵

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pengurus BAZ antara lain, memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja, dan paham fiqh zakat.

BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukan sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah sebagai berikut: Dewan Pertimbangan

berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan atau internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana sendiri memiliki fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. Merencanakan kegiatan tahunan. Dan mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang

³⁵Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), h. 130

diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.³⁶

c. Definisi Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i *amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya.³⁷ Dari pengertian di atas maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Menurut Qardhawi, '*amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan, maupun mencatat keluar masuk surat.³⁸ Menurut Imam Syafi'I, '*amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya.³⁹ Amil zakat adalah orang-orang yang ditugasi imam, kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang mengurus administrasinya.⁴⁰ Dari pengertian di atas, amil zakat adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

d. Syarat-syarat Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai sejak dari mengumpulkan atau mengambil zakat dari para *muzakki* sampai membagikannya kepada para *mustahiq*. Orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa syarat, yaitu beragama Islam. Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan termasuk salah satu rukun Islam, yaitu rukun yang ketiga dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani Islam.⁴¹ Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal pikirannya.⁴² Memiliki sifat amanah/jujur. Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat

³⁶ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat...*, h. 4-6

³⁷ Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 54

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ... h. 545

³⁹ Asnaini, *Zakat Produktif...* h. 54

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah jilid 3*, (Bandung: Al-Ma'aif, 2006), h. 91

⁴¹ Septy Wulandari, "Amil Zakat dalam Pandangan Islam", www.amilzakat.com (diakses pada tanggal 5 Juni 2016)

⁴² Septy Wulandari, "Amil Zakat dalam Pandangan Islam", www.amilzakat.com (diakses pada tanggal 5 Juni 2016)

mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika dihadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelolaan zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya akan semakin tenang mereka untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga itu, begitupun sebaliknya.⁴³Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Seorang petugas juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan.⁴⁴Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.⁴⁵

Para ulama mensyaratkan harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat, dan

menyalurkan kepada *mustahiq*, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran.

Adapun petugas yang secara tidak langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah baiknya merekapun mengetahui hukum-hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman tentang hukum-hukum zakat bagi seorang petugas di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

e. Tugas Amil Zakat

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7, dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:⁴⁶ perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan

⁴³Septy Wulandari, "Amil Zakat dalam Pandangan Islam", www.amilzakat.com (diakses pada tanggal 5 Juni 2016)

⁴⁴Septy Wulandari, "Amil Zakat dalam Pandangan Islam", www.amilzakat.com (diakses pada tanggal 5 Juni 2016)

⁴⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ... h. 551

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.⁴⁷

Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan *infak shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat* dengan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi *muzakki* dan *mustahiq*, baik perseorangan maupun badan hukum dan badan usaha.⁴⁸

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditemukan ada unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas *ulama*, kaum *cendikia*, tokoh masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hokum terhadap pengelola.⁴⁹

Dengan ditetapkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan harta yang dimilikinya, mengangkat derajat *mustahiq*, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah swt.

Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi:⁵⁰ mencatat nama-nama, menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari *muzakki*, mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari *muzakki*, mendoakan orang yang membayar zakat, menyimpan, menjaga, dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* zakat, mencatat nama-nama *mustahiq* zakat, menentukan prioritas *mustahiq* zakat, menentukan besarnya zakat yang akan dibagikan kepada para *mustahiq* zakat, membagikan harta zakat kepada para *mustahiq* zakat, mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendayagunakan harta

⁴⁷Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, h.14

⁴⁸Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, h.14

⁴⁹Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, h.3

⁵⁰Suparman Usman, *Azas-azas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2002), h. 162-163

zakat dan mengembangkan harta zakat.

Posisi ini semakin kuat ketika Presiden RI mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 tentang dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam hal ini, BAZNAS memiliki tugas pokok untuk merealisasikan misi BAZNAS, sebagai berikut:⁵¹ meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat, meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat, mengembangkan budaya “member lebih baik dari menerima”, mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat, menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya, memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

C. KESIMPULAN

Salah satu pengelola zakat dalam wilayah Pemerintahan adalah BAZ (Badan Amil Zakat). Peran lembaga ini memberikan sistem terbaru dalam pengelolaan zakat. lembaga ini, harus

segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Hamid, Mahmud al-Ba’Iy, *Ekonomi Zakat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1991
- Abdul Hamid, *Fiqh Zakat*, Curup: LP2 STAIN, 2012
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahan*, CV. Penerbit Dipenorogo 2005
- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press 2002
- Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Laila, “*Pengertian Zakat, Syarat Sah dan Rukun Zakat*”,

⁵¹Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2007, h. 72

www.pengertianzakat.com (diakses tanggal 5 Juni 2016)

Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012

Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah jilid 3*, Bandung: Al-Ma'aif, 2006

Septy Wulandari, "Amil Zakat dalam Pandangan Islam", www.amilzakat.com (diakses pada tanggal 5 Juni 2016)

Soejono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009

Suparman Usman, *Azas-azas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: gaya Media Pratama, 2002

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996